



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KESIAPAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA JELANG MUDIK LEBARAN 2024

Dewi Restu Mangeswuri
Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.mangeswuri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, melakukan peninjauan terhadap sarana dan prasarana transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat, 29 Maret 2024. Kunjungan dilakukan dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran 2024. Dalam peninjauan, beliau melakukan pengecekan Terminal 1, 2, dan 3, serta landasan dan kondisi pesawat, terutama pada maskapai Lion Air dan Garuda Indonesia. Rencana penyelenggaraan transportasi udara dituangkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menhub dan dihadiri oleh *stakeholder* penerbangan nasional, termasuk Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, antara lain, harga tiket penerbangan, keselamatan penerbangan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) penerbangan, dan masalah keamanan di bandara.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubud Kemenhub) memprediksi 4 juta lebih penumpang akan menggunakan transportasi udara dalam arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2024. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan periode Lebaran 2023. Berdasarkan data pemesanan tiket pesawat, puncak jumlah pemesanan terjadi pada H-4 dan H-3 menjelang lebaran. Operator pesawatpun telah menambah jumlah penerbangan untuk menampung lonjakan pemudik. Rencananya akan ada tambahan sebanyak 1.539 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, terdiri dari 82 penerbangan internasional dan 1.457 penerbangan domestik. Kesempatan juga diberikan kepada operator untuk menambah ekstra *flight* disertai dengan peningkatan dari sisi pelayanan di bandara, termasuk di wilayah Indonesia Timur untuk menjangkau bandara-bandara kecil.

Mengenai tarif tiket pesawat, Kemenhub telah mengingatkan kepada para operator untuk mematuhi tarif batas atas (TBA). Sanksi akan diberikan kepada operator yang melanggar aturan mengenai TBA. Komitmen dari para operator harus ada sebagai suatu bagian pelayanan kepada masyarakat. Berbagai antisipasi dan upaya peningkatan layanan untuk menghadapi lonjakan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan udara telah disiapkan. Diantaranya, masyarakat yang menggunakan penerbangan pada periode H-10 sampai H-5 dapat mendapatkan diskon dan manfaat lainnya. Untuk mengatasi terjadinya lonjakan penumpang itu, Kemenhub memerintahkan agar petugas bandara di area *drop off* ditambah guna menghindari antrean panjang. Selain itu, sebagian besar *counter check-in* saat ini akan difungsikan hanya sebagai tempat untuk meletakkan bagasi. Seperti tahun sebelumnya, Ditjen Hubud Kemenhub akan melaksanakan posko terpadu angkutan udara Lebaran 2024 di kantor pusat Kemenhub dan melakukan pantauan di beberapa bandara.

Semua operator penyelenggara angkutan udara diminta mempersiapkan sarana prasarana transportasi udara dan seluruh pendukungnya, termasuk personel dan prosedur pelayanan. Hal lain yang perlu diantisipasi yaitu cuaca ekstrim dengan mempersiapkan *contingency plan* jika terjadi *accident* dan *force majeure* (bencana alam), serta ancaman keamanan dan ketertiban. Begitupun dengan pelayanan *delay management* juga perlu dipersiapkan untuk memastikan

pelayanan kepada pengguna jasa transportasi udara dapat berjalan dengan baik. Menhub mengapresiasi sistem pemantauan milik Angkasa Pura Indonesia yang mampu mendeteksi situasi udara beberapa jam ke depan, seperti kedatangan pesawat dan potensi keterlambatan. Melalui sistem ini, diharapkan antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan keterlambatan pesawat dapat diminimalisir.

Atensi DPR

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memprediksi 4 juta lebih penumpang akan menggunakan transportasi udara dalam arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian Komisi V DPR RI yaitu dengan meminta Kemenhub agar mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi udara secara maksimal khususnya dari segi kelaikan angkutan udara, memastikan agar operator angkutan udara berpatokan pada TBA yang telah ditetapkan dan tidak mengenakan tarif yang terlalu tinggi agar masyarakat tidak terbebani, serta melakukan sosialisasi kebijakan diskon pada penerbangan dari H-10 sampai H-5 kepada masyarakat. Monitoring penetapan TBA dan sanksi yang tegas kepada operator yang melanggar agar menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Komisi V DPR RI juga perlu meminta Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan laporan cuaca secara aktif dan berkala. Hal ini penting bagi keamanan transportasi.

Sumber

dephub.go.id, 29 Maret 2024;
inaca.or.id, 21 Maret 2024;
liputan6.com, 31 Maret 2024;
mediaindonesia.com, 30 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024